



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Mendagri Akan Bicara dengan Anies

Heboh Anggaran Lem Aibon sampai Pulpen

Gambar, Warta Kota

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bakal bicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Hal itu terkait adanya sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disorot publik.

"Nanti saya komunikasikan dengan Pak Gubernur. Saya sendiri kan baru. Bicara dengan Pak Anies dan Pak Prasetyo, saya kan kenal baik dua-duanya," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Tito mengatakan bahwa anggaran bermasalah itu masih bisa dibicarakan dan diperbaiki. Sebab, masih berbentuk rancangan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Oleh karena itu, Kemendagri belum merasa perlu turun tangan langsung. "Kita lihat saja nanti. Kan masih ada mekanisme internal di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu," ujar Tito.

Awalnya soal lem

Rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik terutama setelah anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, menemukan berbagai anggaran fantastis di dalamnya.

Awalnya, William mengungkapkan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana. Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan

anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

William kemudian menyindir dinas, bahwa seorang murid mendapatkan lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan. "Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?," tulis William pada Selasa (29/10) malam.

Ada puluhan

Lalu, pada Rabu (30/10), William panjang lebar menjelaskan hasil penyisiran PSI terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun 2020.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI itu mengungkapkan, tidak hanya lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, namun dia juga menemukan kegiatan belanja lain yang terindikasi pemborosan anggaran.

Misalnya pembelian pulpen senilai Rp 123 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, pembelian server Jakarta Smart City senilai Rp 65 miliar dan pembelian komputer senilai Rp 132 miliar.

"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak," kata William di DPRD DKI Jakarta.

Sistem tidak smart

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan anggaran lem Aibon disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Adapun biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam link website <http://apbd.jakarta.go.id>.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem

sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah, "Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal. "Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, if itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Tidak ada

Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir. Inshaallah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Syaefuloh menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan

Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Hanya sementara

Sedangkan Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani mengatakan, anggaran mengenai lem aibon sebesar Rp 8,2 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 sifatnya hanya sementara. Ia menjelaskan, anggaran lem aibon itu merupakan biaya operasional pendidikan (BOP) yang harus diinput dalam sistem e-budgeting pada akhir Juli 2019.

Namun, pada waktu yang ditentukan, sekolah-sekolah di Jakarta Barat belum mencantumkan BOP tersebut kedalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Akhirnya, pihak sudin pendidikan Jakarta Barat menginput data sesuai dengan Pagu Anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat.

"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Agus menjelaskan anggaran sementara itu nantinya akan tergantikan dengan RKAS yang sudah diinput oleh setiap sekolah. "Itu yang nanti akan kita matching kan ke dalam sistem. Setelah sistem di-matchingkan baru dirapatkan dengan legislatif," ujar Agus.

Terkait penamaan lem Aibon tersebut ia menyebutkan itu dilakukan oleh operator tata usaha Kasudin Pendidikan Jakarta Barat "Mungkin operator yang menginput memilih yang paling atas saja, udah masukin Rp 82 M dengan hitungan per anak dikali Rp 150.000 itu," ujar Agus.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Mendagri Akan Bicara dengan Anies

Bukan kesalahan

Di sisi lain, Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengaku dalam kesadaran penuh saat mengunggah anggaran lem Aibon pada dokumen rancangan KUA-PPAS 2020. "Sadar," kata Sudarman di gedung Balaikota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Sudarman menyebutkan, apa yang ia unggah itu bukan sebuah kesalahan. Ia lantas menjelaskan, pihak sekolah belum mencantumkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), sementara Sudin pendidikan Jakarta Barat Wilayah I harus mengunggah anggaran di sistem e-budgeting di akhir Juli 2019.

Dalam sistem itu, pihak Sudin Pendidikan bisa memasukkan berbagai jenis rekening sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan kepada mereka. "Saya berpikiran sederhana, kenapa harus banyak-banyak anggaran, ini pun akan diubah sesuai dengan kode rekening (yang dimasukkan sekolah dalam RKAS)," ujar Sudarman.

Terkait pemilihan nama rekening lem aibon, Sudarman mengatakan bahwa ia salah pilih menginput data sementara

tersebut. "Saya sederhana mikirnya itu enggak masalah, tapi ternyata memang ada masalah ini yang jadi pembelajaran ke depannya," kata dia.

Wali Kota tak tahu

Adapun Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengaku tidak tahu menahu soal penganggaran lem Aibon yang dimuat di website APBD DKI Jakarta. Sebab jabatannya tidak berkaitan langsung dengan suku dinas di Pemerintah Kota.

"Soal Aibon itu usulan perencanaan untuk APBD 2020 yang buat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat," kata Rustam dalam keterangan tertulisnya Rabu (30/10). Sebab, jelas Rustam, jabatan Wali Kota di Jakarta bersifat administratif bukan bersifat otonom. Sehingga Kepala Suku Dinas itu bukan aparat organik Wali Kota tetapi aparat organiknya Kepala Dinas Provinsi.

"Jadi soal apakah salah input, salah ketik atau salah perencanaan, itu urusan Kepala Suku Dinas atau Kepala Dinas Provinsi," jelas Rustam.

Bukan data akhir

Sementara itu mengenai anggaran pengadaan pulpen di Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur untuk tahun 2020 yang disebut-sebut mencapai Rp 124 miliar, hal itu dibantah Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun.

Ade Narun menegaskan, pihaknya tak pernah mengganggu pengadaan pulpen di sekolah dengan nominal mencapai Rp 124 miliar. "Enggak, enggak sampai segitu. Saya enggak ingat datanya, yang jelas enggak sampai segitu," katanya di Jakarta Timur, Rabu (30/10).

Menurutnya, ada kesalahan saat William Aditya Sarana melihat situs <https://apbd.jakarta.go.id/> sehingga mendapati anggaran pengadaan pulpen mencapai Rp 124 miliar.

Ade menilai, data yang dilihat William bukan data akhir anggaran pengadaan pulpen yang diusulkan Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. "Anggaran yang diusulkan kan sudah dikroscek, diperbaiki, dibenarkan. Mungkin anggaran yang dilihat belum sampai hasil yang terakhir," ujar Ade. (faf/m24/abs/Kompas.com)